



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Penyuluhan Program Transmigrasi di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong

Rahful A. Madaul^{1*} | La Ibal² | Asriadi³

^{1,2}Program Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Negara Indonesia.

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Negara Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Negara Indonesia.
Email: rafulahmad@gmail.com

Funding information

Universitas Muhammadiyah Sorong.

Abstract

The location of the counseling is Klagulus Village, Makbon District, Sorong Regency, Southwest Papua Province. Persuasive counseling techniques using lecture methods and outreach regarding transmigration. This activity was carried out at the extension center in Klagulus Village, Makbon District, Sorong Regency, and the number of counseling participants was 46 heads of families representing several settlements. The transmigration counseling participants are community leaders, RW, RT, PKK, and vulnerable poor residents who are the targets of the transmigration program. The method used is descriptive-qualitative. The result of this service is that the delivery of transmigration program counseling material is carried out through three stages, namely socialization, implementation of activities, and program planning. This outreach program is intended to convey to the community the transmigration programs that will be built in Klagulus Village as well as the implementation of transmigration.

Keywords

Extension; Transmigration; Program.

Abstrak

Lokasi penyuluhan di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Teknik penyuluhan secara persuasive dengan metode ceramah dan sosialisasi mengenai transmigrasi. Kegiatan ini dilakukan di Balai penyuluhan yang ada di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong dan jumlah peserta penyuluhan sebanyak 46 Kepala Keluarga yang mewakili dari beberapa pemukiman. Adapun peserta penyuluhan transmigrasi adalah dari tokoh masyarakat, RW, RT, PKK serta warga rentan miskin yang menjadi sasaran program transmigrasi. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Hasil dari pengabdian ini bahwa Penyampaian materi penyuluhan program transmigrasi dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, dan perencanaan program. Program penyuluhan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait program-program transmigrasi yang akan dibangun di Kampung Klagulus serta penyampaian penyelenggaraan transmigrasi.

Kata Kunci

Penyuluhan; Transmigrasi; Program.

1 | PENDAHULUAN

Penyelenggaraan transmigrasi dimulai pada tanggal 12 Desember 1950, ketika pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan program kolonisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Program ini diubah namanya menjadi transmigrasi dengan tujuan yang lebih nasionalis. Transmigrasi, yang berasal dari bahasa Belanda "transmigratie," adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk, seperti kota, ke daerah lain, terutama di pedesaan, di dalam wilayah Indonesia. Individu yang terlibat dalam proses transmigrasi disebut Transmigran. Pada saat dimulainya program ini, sebuah kelompok kolonisasi pertama terdiri dari 155 keluarga dari Bagelan, Karesidenan Kedu, dikirim ke Gedongtataan, Lampung. Di lokasi tersebut, para pendatang membangun desa pertama yang diberi nama Bagelen, mengambil nama dari desa asal mereka. Inilah awal dari sejarah transmigrasi yang selama satu abad (mulai dari tahun 1905) telah berkontribusi dalam mendukung perjuangan bangsa, seperti yang diawasi oleh Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi [1].

Penyelenggaraan transmigrasi, yang sebelumnya bersifat terpusat, kini dihadapkan pada tantangan implementasi prinsip desentralisasi dan otonomi. Penerapan desentralisasi telah menjadi dorongan dalam negeri untuk menyegarkan program transmigrasi [2][3]. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengakibatkan perubahan dalam penyaluran wewenang pada penyelenggaraan transmigrasi, tetapi juga menuntut agar pelaksanaan program transmigrasi sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi khusus di setiap daerah [4]. Pelaksanaan program transmigrasi melibatkan pemerintah pada berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan mental/spiritual, olahraga, seni, dan lain-lain. Transmigrasi memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional, dan individu yang menjadi subjek transmigrasi telah memberikan kontribusi positif pada pengembangan wilayah. Tantangan terkini dalam transmigrasi tidak hanya terfokus pada pemerataan jumlah penduduk, tetapi juga menuntut agar transmigrasi menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Implementasinya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi khusus di setiap daerah, dengan penekanan pada wawasan kultural dan kearifan lokal [5].

Perlu terus meningkatkan program dan pengembangan transmigrasi, karena selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, transmigrasi juga berperan sebagai alat pengaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) [6]. Jika pulau-pulau terdepan (terluar) Indonesia dibiarkan tidak berpenghuni, ada risiko klaim dari negara lain terhadap pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, implementasi transmigrasi menjadi sangat penting dengan tujuan memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduk, seperti Jawa, ke pulau-pulau atau daerah terluar Indonesia, seperti di Kalimantan atau Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia, atau di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Proses perpindahan penduduk ini selalu beriringan dengan pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya membangun sektor perkebunan dan industri di lokasi transmigrasi [7]. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi dianggap sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan kota-kota kecil, terutama di luar pulau Jawa. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai motor penggerak pembangunan daerah, guna mengatasi rendahnya daya saing daerah yang disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, kesenjangan pembangunan yang luas antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat; kedua, rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk hubungan antara kota dan desa [8].

Kesuksesan pelaksanaan program transmigrasi bergantung pada tiga faktor utama, yaitu: (a) pemukiman transmigrasi yang memenuhi standar Clear and Clean (2C), Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang (3L); (b) transmigran yang memiliki kualitas baik dari segi kompetensi, mental, dan semangat berjuang; (c) pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat transmigran yang sesuai dengan potensi dan kondisi setempat [9]. Perhatian yang serius terhadap ketiga aspek tersebut sangat diperlukan guna mencapai keberlanjutan pelaksanaan program transmigrasi. Dari ketiganya, fokus pada aspek pemukiman transmigrasi menjadi hal yang krusial, di mana lokasinya harus memenuhi standar Clear and Clean serta Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang, dengan tambahan persyaratan terpenuhinya Layak Lingkungan (4L). Keberhasilan dalam memenuhi persyaratan tersebut menjadi suatu keharusan sejak tahap awal perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi [10].

Program transmigrasi menjadi hal yang penting bagi masyarakat Kampung Klagulus karena dapat meningkatkan perkembangan kampung tersebut. Kegiatan penyuluhan sangat diharapkan mengingat belum ada pengetahuan terkait program transmigrasi tersebut. Selain itu diharapkan adanya program transmigrasi dapat mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas daerah yang jarang penduduk. Sistem pemberdayaan dan pembinaan

masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi pada masyarakat transmigrasi.

2 | METODE

Maksud dan tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi mengenai program transmigrasi, memberikan gambaran lokasi, menjelaskan persyaratan bagi calon transmigran, memberikan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban transmigran, serta memberikan informasi mengenai larangan-larangan dalam proses transmigrasi. Sosialisasi adalah suatu tindakan yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan suatu program dan memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan program tersebut [11]. Program transmigrasi diharapkan mampu menarik minat masyarakat yang berkeinginan meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian di tempat penempatan transmigrasi. Lokasi penyuluhan di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Teknik penyuluhan secara persuasive dengan metode ceramah dan sosialisasi mengenai transmigrasi. Kegiatan ini di lakukan di Balai penyuluhan yang ada di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong dan jumlah peserta penyuluhan sebanyak 46 Kepala Keluarga yang mewakili dari beberapa pemukiman. Adapun peserta penyuluhan transmigrasi adalah dari tokoh masyarakat, RW, RT, PKK serta warga rentan miskin yang menjadi sasaran program transmigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dari tanggal 25 Oktober 2023.

3 | HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil

3.1.1 Sosialisasi

Sosialisasi di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Sosialisasi yang diadakan tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat mampu mengetahui gambaran umum dari program transmigrasi dan penempatan penduduk pada lokasi yang dituju. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi mengenai program transmigrasi, memberikan gambaran lokasi, menjelaskan persyaratan bagi calon transmigran, memberikan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban transmigran, serta memberikan informasi mengenai larangan-larangan dalam proses transmigrasi.



Gambar 1. Sosialisasi Terkait Pentingnya Program Transmigrasi

3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat sebagai peserta program transmigrasi di kampung Klagulus menyampaikan pendapat melalui tanya-jawab untuk mengetahui program transmigrasi di kampung tersebut. Selain itu masyarakat menginginkan program transmigrasi untuk tepat sasaran. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu pelaksanaan pengembangan masyarakat guna mempercepat pencapaian tujuan kemandirian masyarakat transmigran dan daerah transmigrasi yang mandiri. Respon masyarakat sangat positif dengan semangat yang tinggi, karena kehadiran lokasi

transmigrasi akan membawa kehidupan yang lebih dinamis, peningkatan jumlah penduduk, dan mempercepat pengembangan lahan yang sebelumnya terbengkalai dan tidak terurus. Hasil pertanian juga akan lebih mudah tersedia, sementara para transmigran dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dengan Masyarakat Kampung Klagulus

3.1.3 Perencanaan Program

Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi memerhatikan keberlanjutan lokasi transmigrasi sebagai faktor kunci dalam kesuksesan program transmigrasi, berdasarkan kriteria 4L yang telah disebutkan. Kelayakan lokasi mencakup aspek keberlanjutan kehidupan para penghuni (transmigran), kelangsungan lingkungan, dan pengembangan wilayah. Kelayakan hunian dapat dinilai melalui beberapa aspek, termasuk kerawanan terhadap bencana, kesehatan, penyediaan air bersih, ketersediaan sarana transportasi yang mudah dan mendukung konektivitas dengan daerah sekitar, serta ketersediaan fasilitas umum. Kelayakan usaha dievaluasi berdasarkan ketersediaan lahan pertanian atau peluang usaha yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan produksi, ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang diperlukan, serta ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antara lokasi permukiman dan pusat pemasaran. Kemampuan untuk berkembang dapat diperhatikan dari kapasitas yang besar, keterhubungan antar unit-unit permukiman serta aksesibilitas dengan pusat pemerintahan dan pasar, kontribusi terhadap pembangunan daerah, keberadaan komoditas unggulan dengan skala ekonomi yang signifikan, dan adanya keterkaitan ekonomi antar kawasan dengan pusat-pusat pemasaran yang lebih besar. Kelayakan lingkungan dapat dinilai berdasarkan dampak yang dihasilkan dari proses pembangunan dan pengembangan wilayah transmigrasi, termasuk dampak terhadap kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan tersebut.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Kampung Klagulus

3.2 Diskusi

Penyampaian materi penyuluhan program transmigrasi dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, dan perencanaan program. Program penyuluhan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait program-program transmigrasi yang akan dibangun di Kampung Klagulus serta penyampaian penyelenggaraan transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi melalui dua tahap ini mengacu pada semua aspek yang terkait dengan persiapan pemukiman yang memenuhi syarat sebagai tempat hunian yang layak, sesuai untuk kegiatan usaha, dan memiliki potensi untuk berkembang. Hal yang sama berlaku untuk arahan, penempatan, serta pembinaan masyarakat transmigran dan lingkungan di pemukiman transmigrasi hingga penyerahannya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan-pendekatan yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti (1) desentralisasi, yang melibatkan peningkatan peran pemerintah daerah; (2) demand, yang berkaitan dengan penyerahan dan penempatan; (3) partisipasi masyarakat, yang menekankan peran aktif masyarakat; (4) target fisik dan non-fisik; (5) pola usaha; dan (6) informatif. Oleh karena itu, keputusan untuk bertransmigrasi sebaiknya tetap menjadi pilihan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, penting bagi daerah tujuan transmigrasi dan prospek pengembangannya untuk memainkan peran kunci dalam meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat yang berfokus pada: (a) Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya; (b) Peningkatan dan penyebaran pembangunan di berbagai daerah; dan (c) Penguatan persatuan dan kesatuan [12]. Partisipasi dalam program transmigrasi dianggap sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan sektor pertanian dengan mengalihkan teknologi inovatif kepada petani asli Papua. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka, sehingga mampu memperluas skala usahatani dan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Penting untuk dicatat bahwa proses adopsi inovasi teknologi oleh petani asli Papua memerlukan waktu yang relatif lama dan melibatkan tahapan yang kompleks.

4 | KESIMPULAN

Penyampaian materi penyuluhan program transmigrasi dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, dan perencanaan program. Program penyuluhan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait program-program transmigrasi yang akan dibangun di Kampung Klagulus serta penyampaian penyelenggaraan transmigrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan rasa terima kasih kepada para pihak yang ikut dalam kegiatan penyuluhan transmigrasi ini, terutama kepada masyarakat Kampung Klagulus Distrik Makbon Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang memberikan kontribusi besar dan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berhasil dilaksanakan, serta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini Dinas Transmigrasi yang telah membantu dalam kegiatan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong atas bantuannya selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung.

REFERENSI

- [1] Karimah, D. (2018). Kebijakan Djawatan Transmigrasi Dalam Pelaksanaan Transmigrasi Purworejo Tahun 1953-1958. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 3(3), 304–316.
- [2] Zuriyah, Y., Purba, W., & Saleh, W. (2023). Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian. 1, 71–92. DOI: <https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.132>.
- [3] Umi, Y. (2017). Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah Dan Harapan. *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 12(1), 13–24. DOI: <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.215>.
- [4] Vania, S. (2021). Analis terhadap program transmigrasi serta pengembangan wilayah di unit permukiman transmigrasi Geumpang II SP 3 Provinsi Aceh. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 113–123. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v2i2.3819>.

- [5] Adam, F. (2021). Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah. 148.
- [6] Daim, C. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus : Kabupaten Natuna). 16(2), 175–192. DOI: <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.199>.
- [7] Sukarno, T. D., Siregar, N. A. M., & Yustina, F. (2023). Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8157>.
- [8] Ibal, L., Murni, & Rahful A. Madaul. (2023). Analisis Potensi Untuk Rencana Kawasan Transmigrasi Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.3997>.
- [9] Oktafiani, I., & Yogaswara, H. (2020). Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 200–220. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.10723>.
- [10] Musdalifah. (2018). Pengaruh Transmigrasi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Paselloreng Kabupaten Wajo. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [11] Ibal, L., & Abubakar, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2022 di Desa Batu Putih Kabupaten Konawe Selatan. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.150>.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009. (2009). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

How to cite this article: Madaul, R. A., Ibal, L., & Asriadi. (2023). Penyuluhan Program Transmigrasi di Kampung Klagulus Distrit Makbon Kabupaten Sorong. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 388–393. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.225>.